



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11348-11359

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Penerapan Sak Etap Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Napoleon Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi

Sri Sumantri<sup>1✉</sup>, Said Saleh Salihi<sup>2</sup>, Ayudin<sup>3</sup>

Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Email: [srisumantri25@gmail.com](mailto:srisumantri25@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Napoleon Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dengan wawancara langsung kepada perangkat Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi khususnya kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, serta data sekunder diperoleh dari dokumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Napoleon Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Hasil penelitian menunjukkan BUMDesa Napoleon Desa Waitii Barat di Kecamatan Tomia sudah membuat laporan keuangan namun belum menerapkan SAK ETAP. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan pengelola BUMDesa terhadap akuntansi. Saran untuk hal tersebut adalah Pemerintah Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi hendaknya mengadakan pelatihan/pembinaan kepada Pengelola BUMDesa terkait penyusunan laporan keuangan dan membuat aplikasi akuntansi untuk BUMDesa agar memudahkan pengelola dalam menerapkan akuntansi, sehingga pengelola BUMDesa dapat membuat laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP.

Kata Kunci: *BUMDesa, Laporan Keuangan, SAK ETAP.*

## Abstract

This research aims to analyze the implementation of SAK ETAP in Napoleon Village-Owned Enterprises (BUMDesa), West Waitii Village, Tomia District, Wakatobi Regency. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. Data sources were obtained from primary data by direct interviews with West Waitii Village officials, Tomia District, Wakatobi Regency, especially the village head, village secretary and village treasurer, as well as secondary data obtained from Napoleon Village-Owned Enterprise (BUMDesa) documents, West Waitii Village, Tomia District, Wakatobi Regency. . The research results show that BUMDesa Napoleon West Waitii Village in Tomia District has prepared financial reports but has not implemented SAK ETAP. This is caused by the limited knowledge of BUMDesa managers regarding accounting. The suggestion for this is that the West Waitii Village Government, Tomia District, Wakatobi Regency should provide training/coaching to BUMDesa Managers regarding preparing financial reports and creating accounting applications for BUMDesa to make it easier for managers to apply accounting, so that BUMDesa managers can make reports in accordance with Financial Accounting Standards. (SAK) ETAP

Keyword: *BUMDesa, Financial Reports, SAK ETAP*

## PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat, peranan akuntansi sangatlah penting sebagai sumber informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi bisnis yakni perusahaan. Penerapan akuntansi dilakukan guna menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak pengguna baik internal maupun eksternal perusahaan, laporan keuangan ini akan menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan yang akan menentukan keberlangsungan usaha dimasa depan.

Dengan penerapan akuntansi yang baik, pelaku usaha dapat mengetahui bagaimana perkembangan usahanya. Dalam hal pencatatan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan kecil dan menengah atau entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik (Taruh & Usman, 2021).

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemerintah yang didirikan dengan maksud untuk menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat memberikan manfaat umum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Wijaya, 2023). Oleh karena itu sebagai usaha desa, diharapkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa mampu mendorong potensi desa guna memaksimalkan aspek ekonomi, hasil alam,

maupun kapasitas masyarakat dalam desa (Lestari & Arafat Hermana, 2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa, juga membuat pemerintah desa mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa sehingga dapat membantu perekonomian daerah guna menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen (Zunaidah et al., 2021).

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh (Republik Indonesia, 2014) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa". Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di psahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Melalui manajeme yaitu dengan pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu desa untuk mencapai tujuan yang dikehendaki desa tersebut (Rafi'i et al., 2020).

Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Gayatri & Widhiyani, 2020). Cara kerja BUMDesa adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa Dalam skenario ini, badan usaha yang terbagi untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya manfaat masyarakat desa, seluruh atau sebagian besar modalnya dipegang oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari aset desa (Israwati et al., 2023). Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal yakni iyalah Anggota BUMDesa, Pengurus BUMDesa, Komite atau Badan Pengawas maupun pihak eksternal yakni Pemerintah, Lembaga Keuangan, Masyarakat Desa, Lembaga Sosial dan Non-Pemerintah, serta Mitra Bisnis (Setiawan et al., 2018).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 menyebutkan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi." (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, 2015) Pasal 12 ayat 3 menyebutkan: "Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang (a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; (b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; (c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kecamatan Tomia merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Wakatobi yang memiliki Badan Usaha Milik Desa di Waitii Barat bergerak di bidang permodalan yang menjalankan usaha Simpan Pinjam untuk membantu memberikan modal kepada masyarakat agar dapat meningkatkan usahanya. Modal awal Badan Usaha Milik Desa berasal dari APBDesa. Dalam hal ini tidak terdapat penyertaan modal dari masyarakat untuk Badan usaha milik desa (BUMDesa). Bersumber dari APBDesa dan laba yang dihasilkan oleh BUMDesa, Badan usaha milik desa di Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia telah banyak membantu masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha maupun keperluan sehari-hari. modal usaha BUMDesa adalah  $\geq 50.000.000$ , yang dialokasikan dari APBDesa untuk sebagian pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di permodalan pembayaran tagihan lancar atau macet yang ada di Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia yang sudah dan akan disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat, sejak tahun 2015 hingga saat ini. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam menyusun laporan keuangannya hanya menerapkan pencatatan akuntansi berupa buku kas harian, neraca dan laporan laba rugi, peneliti juga meninjau pada BUMDesa Napoleon yang tidak membuat laporan keuangan sama sekali melainkan hanya catatan kas umum yang berisi informasi dana keluar dan masuk. Jika hal ini terus berlangsung, maka pengelolaan keuangan yang tidak tepat dapat berpotensi terhadap pengambilan keputusan yang salah dan berdampak buruk bagi kelangsungan usaha.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Usaha Milik Desa sebaiknya berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dimana laporan keuangan lengkap yang harus disajikan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan informasi yang tepat dan akurat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta mencerminkan kinerja dari Badan Usaha Milik Desa (Arafah Arifin et al., 2022). Menurut Dalam menyusun laporan keuangan, Badan SAK ETAP Neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan

laporan keuangan (Wahyuningtias et al., 2021).

Usaha Milik Desa harus memperhatikan standar keuangan yang digunakan, artinya dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Arafah Arifin et al., 2022). Dari sekian banyak BUMDesa di Indonesia banyak yang belum dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Salah satunya yang telah penulis ketahui dari hasil kegiatan survey sebelumnya pada BUMDesa yang ada Di Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia, belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAKETAP.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa dengan judul "Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha MiliK Desa Napoleon Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi"

#### METODE PENELITIAN

Jenis Data kualitatif merupakan data yang dapatkan melalui analisis yang dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah mengenai penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (Kamayanti, 2020). Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Usaha MiliK Desa Napoleon Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Data kualitatif yang dapat diperoleh melalui analisis wawancara secara langsung untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) mencakup Pengelolaan Keuangan BUMDesa, Hambatan dalam Penerapan SAK ETAP, Pencatatan Transaksi, Pelaporan Keuangan: Persepsi tentang SAK ETAP: Kebijakan dan Proses Internal: Peluang dan Manfaat, Kendala Teknis,Rekomendasi dan Harapan (Kamayanti, 2020). Teknik analisis dilakukan dengan teknik reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Azmi et al., 2018).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Napoleon Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi adalah suatu lembaga di pedesaan yang bergerak di bidang keuangan yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang mempunyai usaha dan berdomisili di Desa Waitii Barat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan salah satu wujud dari badan usaa ekonomi yang ada di desa. Badan usaha ini bergerak di bidang

unit jasa keuangan atau unit usaha pengkreditan/simpan pinjam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta di kelolah oleh pengurus BUMDesa.

Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDesa Napoleon menggunakan sistem pencatatan single entry yang dibuat oleh pengelola BUMDesa. Pencatatan keuangan dengan sistem single entry ini dianggap sudah mampu memberikan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan pencatatan single entry lebih mudah dipahami. Berikut catatan dan laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesa

#### 1. Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan BUMDesa Napoleon

Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDesa Napoleon menggunakan sistem pencatatan single entry yang dibuat oleh pengelola BUMDesa. Pencatatan keuangan dengan sistem single entry ini dianggap sudah mampu memberikan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan pencatatan single entry lebih mudah dipahami. Berikut catatan dan laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesa:

##### a) Buku kas harian

Buku kas harian merupakan catatan yang dibuat oleh BUMDesa Napoleon yang terdiri dari akun pemasukan dan pengeluaran, buku kas ini mencatat pemasukan yang diperoleh dari pengembalian dana pinjaman masyarakat setiap bulannya juga pengeluaran kas yang berupa pinjaman masyarakat.

Pada konsep akuntansi pencatatan transaksi dilakukan dengan penjurnalan dengan double entry, contohnya pada kasus buku kas harian ini yang mencatat penambahan dan pengurangan piutang, pengurangan piutang di jurnal dengan kas di debit dan piutang di kredit, namun pada pencatatan yang dibuat oleh BUMDesa Napoleon hanya sebatas catatan berupa jumlah dana yang keluar dan masuk saja.

##### b) Laporan keuangan

Dalam SAK ETAP (Berlian et al., 2020) tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, ini artinya BUMDesa harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP.

##### 1) Neraca

BUMDesa Napoleon menyajikan Neraca yang berisi aktiva berupa asset lancar dan asset tidak lancar dan pasiva yang berisi informasi mengenai kewajiban dan ekuitas yang

dimiliki oleh BUMDesa

## 2) Laporan LabaRugi

BUMDesa Napoleon menyajikan laporan laba rugi dimana pada laporan yang disajikan terdiri dari jumlah laba kotor yang dihitung dari laba yang diperoleh atas biaya jasa unit usaha, dikurangi dengan jumlah total biaya operasional yang dikeluarkan. Hal ini kurang sesuai dengan konsep SAK ETAP dimana pada sak etap laporan laba rugi terdiri dari total pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sehingga menghasilkan laba kotor. Pada laporan ini BUMDesa juga mencantumkan informasi mengenai kemana laba yang diperoleh akan dialokasikan.

## 3) Laporan Perubahan Ekuitas

BUMDesa Napoleon adalah laporan perubahan modal, dimana laba/rugi terdiri dari total keseluruhan modal ditambah dengan surplus modal yang diperoleh dari alokasi laba.

## 4) Laporan ArusKas

Dalam laporan keuangan BUMDesa Mandiri tidak menyajikan laporan arus kas yang berisi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dalam transaksi yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa.

## 5) Catatan atas LaporanKeuangan

BUMDesa tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Hal ini belum sesuai dengan SAK ETAP yang mensyaratkan Entitas harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan penuh pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

## 2. Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Napoleon

Adapun hasil dari penelitian penerapan Akuntansi berdasarkanSAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Napoleon di Desa Waitii Barat dapat dijelaskan menggunakan tabel sebagai berikut:

Keterangan:  $\sqrt{\phantom{x}}$  = Ya

- = Tidak

Tabel 1. Hasil Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa Napoleon

Unsur- unsur laporan keuangan	SAK ETAP	BUMDesa Napoleon	
			Keterangan
	Neraca		$\sqrt{\phantom{x}}$
	Laporan Laba Rugi		$\sqrt{\phantom{x}}$
	Laporan Perubahan Ekuitas		-

	Laporan Arus Kas	-
	Catatan Atas Laporan Keuangan	-
	Penyajian Wajar	-
	Kepatuhan terhadap SAK ETAP	-
Penyajian laporan keuangan	Kelangsungan Usaha	√
	Frekuensi Pelaporan	-
	Penyajian yang Konsisten	-
	Informasi Komparatif	-
	Materialitas	-
	Laporan Keuangan Lengkap	-

Sumber: Data diolah dari BUMDesa Napoleon

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari BUMDesa Napoleon yang ada di Desa WaitiiB Barat Kecamatan Tomia yakni BUMDesa dalam penyajian laporan keuangannya hanya menerapkan kelangsungan usaha. BUMDesa Napoleon telah membuat laporan keuangan namun belum lengkap sesuai dengan SAK ETAP. Meskipun BUMDesa Napoleon telah membuat laporan keuangan yang disusun setiap periode, tetapi tidak membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sehingga belum dapat dikatakan sesuai dengan SAK ETAP, bahkan dapat dilihat hanya BUMDesa Napoleon yang menyusun laporan perubahan ekuitas.

Penerapan akuntansi untuk BUMDesa berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Berdasarkan SAK ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP dan laporan keuangan yang lengkap adalah apabila memenuhi : penyajian wajar, kepatuhan terhadap SAK ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif, materialitas, dan laporan keuangan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Usaha Milik Desa napoleon di desa waitti barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

BUMDesa Napoleon di Desa Waitii Barat sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Dalam pencatatan atau pembukuan semua transaksi dari kegiatan usaha tidak semua mengikuti ketentuan akuntansi yang benar seperti jurnal, buku besar dan ketentuan akuntansi lainnya. BUMDesa Napoleon di Desa Waitii Barat memiliki pencatatan berupa buku kas yang berisi informasi pengeluaran dan pemasukan kas. BUMDesa Napoleon di Desa

Waitii Barat dalam pencatatan dan pembukuannya masih berdasarkan pemahaman pengelola saja. Menurut pengelola BUMDesa yang terpenting adalah laporan keuangan yang dibuat mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan pengelola tidak begitu memahami tentang standar akuntansi, sehingga laporan keuangan yang telah dibuat dirasa sudah cukup menjadi informasi keuangan bagi BUMDesa.

Laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDesa Napoleon di desa Waitii Barat belum sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan hanya memuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, BUMDesa tidak memiliki laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal penyajian laporan keuangan juga dinilai belum memenuhi SAK ETAP. Pada Penyajian Wajar BUMDesa Napoleon belum bisa dikatakan wajar karena tidak memperhatikan kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan beban. Dari segi kelangsungan Usaha BUMDesa Napoleon menjalankan usaha dan operasionalnya dengan baik. BUMDesa juga telah membuat laporan keuangan sesuai dengan frekuensi pelaporan yaitu minimum satu tahun sekali, akan tetapi laporan yang disajikan belum lengkap. Pos-pos dalam laporan keuangan belum konsisten dan belum diklasifikasikan sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan yang disajikan juga belum memasukkan informasi komparatif, walaupun pada dasarnya laporan keuangan telah dibuat dan bersifat komparatif, namun hal ini hanya dapat dipahami oleh internal BUMDesa saja karena penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa juga belum sepenuhnya memisahkan pos-pos yang material, pos-pos umum yang telah dipisahkan berupa aset, kewajiban, dan modal, namun untuk pos beban tidak diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan fungsinya.

Dari hasil penelitian didapatkan juga bahwa BUMDesa di Napoleon Desa Waitii Barat memiliki kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP karena pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola BUMDesa mengenai akuntansi dan SAK ETAP masih terbatas, pengelola berpendapat bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan pada kegiatan pembimbingan BUMDesa oleh pemerintah setempat tidak diajarkan cara membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP tersebut. Hal ini menyebabkan BUMDesa belum mampu menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan dan belum dapat membuat laporan keuangan yang lengkap.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai penerapan SAK ETAP pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDesa Napoleon desa waitii barat Kecamatan tomia sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa Napoleon di Kecamatan tomia dalam pencatatan dan pembukuannya masih berdasarkan pemahaman pengelola saja. Adapun laporan keuangan yang dimiliki BUMDesa Napoleon adalah sebagai berikut:
  - a. BUMDesa Napoleon memiliki pencatatan buku kas, dan laporan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, BUMDesa Napoleon tidak menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
  - b. BUMDesa Napoleon hanya melakukan pencatatan pada buku kas umum, tidak membuat laporan lengkap sesuai SAK ETAP.
  - c. BUMDesa Napoleon memiliki catatan buku kas harian, dan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi saja.

Dalam hal penyajian laporan keuangan juga dinilai belum memenuhi SAK ETAP baik dari segi Penyajian Wajar, Frekuensi Pelaporan, Penyajian yang Konsisten, Informasi Komparatif, maupun Materialitas. Dalam hal ini ketiga BUMDesa hanya menerapkan Kelangsungan Usaha.

2. Adapun kendala kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP karna pengetahuan pengelola BUMDesa mengenai akuntansi dan SAK ETAP masih terbatas, pengelola berpendapat bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan pada kegiatan pembimbingan BUMDesa oleh pemerintah setempat tidak diajarkan cara membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP tersebut. Hal ini menyebabkan BUMDesa belum mampu menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan dan belum dapat membuat laporan keuangan yang lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafah Arifin, S., Inapty, B., & Dwi Astuti, B. R. (2022). Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Miliki Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.262>
- Azmi, Z., Nasution, A. A., & Wardayani, W. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif dalam

- Akuntansi. *Akuntabilitas*. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.6338>
- Berlian, R. J., Luhsari, D. I., & Ismanto, B. (2020). SAK ETAP: Evaluasi Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1414>
- Gayatri, G., & Widhiyani, N. L. S. (2020). Peranan BUMDesa dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p19>
- Israwati, I., Marwansyah, Nizamil Fadhli, & T. Irawan. (2023). Pentingnya Pengelolaan Manajemen SDM Bagi Sebuah Organisasi DI BUMDES Amanah. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v2i2.578>
- Kamayanti, A. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi). In *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)*. <https://doi.org/10.52893/peneleh.2020.39.ak>
- Lestari, N., & Arafat Hermana, M. (2019). Analisis Yuridis Pebentukan Badan Usaha Miliki Desa. (BUM Desa) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 TAHUN 2014 Tentang Desa. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*. <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i2.1171>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Jakarta (2015).
- Rafi'i, A., Indarajaya, K., & Hikmah, N. (2020). Implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Administrasi Publik*.
- Republik Indonesia, P. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Setiawan, D., Jostenz, T. G., & Novalino, R. D. A. (2018). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Miliki Desa. Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Memujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah .... *Ekonomi Pertahanan*.
- Taruh, V., & Usman. (2021). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP). *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v1i1.4>
- Wahyuningtias, A., Yuliarti, N. C., & Martiana, N. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes Rejo Makmur Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. *Baswara: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

- Wijaya, N. (2023). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Miliki Desa. (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v10i1.118>
- Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. (2021). Peran Usaha Bumdes Berbasis Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Agribisnis*.